

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keterwakilan politik perempuan di Indonesia masih dikatakan belum ideal untuk bisa menyuarakan kepentingan politik perempuan di parlemen. Di Indonesia keterwakilan politik perempuan masih jauh dari target yang diinginkan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat belum ada yang bisa memenuhi target kuota 30% keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Kebijakan *Affirmative action* adalah bagian dari prinsip keadilan dalam demokrasi yaitu melalui pemenuhan minimal 30% perempuan sebagai anggota legislatif dan penempatan perempuan caleg dalam daftar calon anggota legislatif. Peraturan lainnya tentang keterwakilan perempuan dalam politik juga diatur dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2008 ayat 2 tentang penerapan *zipper system* yakni setiap 3 bakal calon legislatif minimal terdapat satu bakal calon legislatif perempuan. Dalam lingkup *affirmative action*, kuota *zipper system* merupakan salah satu cara untuk demokrasi yang lebih inklusif.¹

Kebijakan tersebut menjadi landasan setiap akan mengadakan pemilu, begitupun pada pemilu legislatif di Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019.

¹ Nur Asikin Thalib. (2014). Penguatan Hak Politik Perempuan melalui Peraturan Perundang-

Dalam tabel 1.1 menggambarkan jumlah perempuan caleg pada pemilu 2019 oleh beberapa partai peserta sebagai berikut.

Tabel 1.1
Daftar Jumlah Perempuan caleg di Kabupaten Tanah Datar pada Pemilu 2019

| No | Partai Pengusung | Jumlah Caleg Perempuan |
|----|------------------|------------------------|
| 1 | PKB | 11 orang |
| 2 | GERINDRA | 12 orang |
| 3 | PDIP | 10 orang |
| 4 | GOLKAR | 12 orang |
| 5 | NASDEM | 12 orang |
| 6 | BERKARYA | 8 orang |
| 7 | PKS | 12 orang |
| 8 | PERINDO | 7 orang |
| 9 | PPP | 13 orang |
| 10 | PSI | 1 orang |
| 11 | PAN | 13 orang |
| 12 | HANURA | 13 orang |
| 13 | DEMOKRAT | 13 orang |
| 14 | PBB | 12 orang |
| | Jumlah | 149 orang |

Sumber: Website KPU Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel diatas di Tanah Datar sendiri pada pemilu 2019 terdapat 149 orang perempuan caleg yang terdaftar untuk mengikuti pemilu dan berasal dari 14 partai pengusung diantaranya; PKB, Partai Gerindra, PKS, Golkar, PPP, PAN, Demokrat, Nasdem, PSI, Perindo, PBB, partai Berkarya, Hanura dan PDIP. Melihat tabel tersebut dapat dilihat bahwa sejatinya partai politik telah memenuhi kebijakan administratif kuota 30%.

Namun jika dibandingkan dengan jumlah komposisi keterpilihan perempuan masih rendah seperti yang terdapat pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Anggota DPRD Kab, Tanah Datar Periode 2019-2024

| No | Nama partai | Laki –laki | Perempuan | Jumlah orang |
|----|-------------|--------------|------------------|-----------------|
| 1 | Gerindra | 4 | 1 | 6 |
| 2 | PKS | 5 | - | 5 |
| 3 | Golkar | 4 | - | 4 |
| 4 | PPP | 4 | - | 4 |
| 5 | PAN | 4 | - | 4 |
| 6 | Demokrat | 3 | 1 | 4 |
| 7 | Nasdem | 3 | - | 3 |
| 8 | Hanura | 3 | 1 | 3 |
| 9 | PDI-P | 2 | - | 2 |
| | | Total | 3 (8.57%) | 35 orang |

Sumber: Website Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa hasil keterpilihan anggota DPRD sebanyak 35 orang dengan perbandingan 32 orang laki-laki dan 3 orang perempuan yang terpilih, hasil ini hanya menyumbangkan 8.57% keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar.

Persoalan tentang keterwakilan politik perempuan saat ini masih menjadi bahasan utama dalam kajian ilmu politik. Hasil ini menunjukkan bahwa keterwakilan politik perempuan di Kabupaten Tanah Datar masih belum memenuhi harapan 30% keberadaan perempuan dalam parlemen.

Kebijakan *affirmative* lebih cenderung sebagai indikator kelolosan partai dalam administrasi, namun partai politik tidak secara serius memberikan pendidikan politik kepada perempuan secara potensial untuk mewakili rakyat.

Dengan keikutsertaan perempuan sebagai calon anggota legislatif yang dianggap dapat membawa perubahan bagi demokrasi Indonesia maka pemahaman tentang politik atau literasi politik merupakan hal yang sangat penting bagi seorang caleg perempuan sebagai salah satu pemberdayaan untuk memenuhi keterwakilan politik perempuan di parlemen.

Berangkat dari teori psikologis, literasi politik adalah pemahaman tentang politik, tidak hanya berdasarkan pengetahuan tetapi juga keterampilan dan kemampuan dalam menghadapi isu-isu politik yang terjadi. Menurut Bernard Crick, literasi politik merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan dan sikap untuk dikembangkan bersama-sama, masing-masing mengkondisikan dengan dua lainnya. Literasi politik adalah pemahaman praktis tentang suatu konsep yang diambil dari kehidupan dan bahasa sehari-hari. Literasi politik adalah upaya untuk memahami isu utama politik, keyakinan para kontestan, bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat banyak, serta cenderung menyelesaikan masalah dengan cara yang efektif sekaligus menghormati ketulusan orang lain dengan apa yang mereka yakini.²

Literasi Politik sendiri sangat diperlukan terutama untuk caleg perempuan sebagai penguatan dan pemberdayaan politik warga negara, dalam mengedukasi hak-hak politik warga Negara terutama para caleg perempuan yang masih awam akan hal-hal yang berkaitan dengan politik sehingga mereka memahami benar posisinya, menggunakan haknya dengan benar dan tidak hanya sekedar orang-orang yang memenuhi kuota 30% keterwakilan politik di parlemen.

² Heryanto, G. G. (2019). *Literasi Politik*. IRCiSoD.

Literasi politik dapat membuat mereka mengerti bahwa pemilihan umum bukan hanya ajang untuk sekedar ikut serta dalam pemilu tetapi mereka harus memanfaatkan dengan baik dan benar serta bertanggung jawab terhadap hak politik yang mereka miliki.

Literasi politik memiliki potensi untuk dapat memberikan pemahaman dengan dasar beberapa elemen seperti pengetahuan, ketelitian dan intelektual. Menurut Mudhok menawarkan setidaknya 4 elemen literasi politik, antara lain: 1) Sadar akan hak dan juga perannya dalam aktivitas politik. 2) Untuk mendapatkan hasil yang baik maka dibutuhkan kemampuan dalam beropini agar proses politik itu dapat berhasil dengan baik. 3) Masyarakat penting untuk mengetahui tentang kerja dari pemerintahan. 4) Berpartisipasi dalam aktivitas politik.³

Penelitian-penelitian tentang literasi politik dan keterwakilan politik perempuan sudah banyak dilakukan diantaranya: a. Nora Eka Putri (2015), b. Fredik Lambertus Kollo (2017), c. Totok Inwantoro (2019), d. Anggi Novita (2019). Semua penelitian tersebut membahas persoalan literasi politik dari faktor yang menghambat partisipasi perempuan dari segi budaya, dampak dan upaya peningkatan literasi politik.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa persoalan literasi politik perempuan di Indonesia masih kurang dari segala aspek dan menjadi bahasan utama dalam kajian politik di Indonesia terutama di kalangan perempuan Indonesia yang cenderung dijadikan alat politik oleh partai politik.

³ Derif Ihza Bagaskara. Skripsi: "Peranan Kedai Kopi Dalam Menumbuhkan Budaya Literasi Politik Mahasiswa Tahun 2020". (Bandung: Universitas Pasundan, 2020). Hal 25

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di samping karena lokasi atau objek penelitian yang berbeda peneliti melihat dari sudut pandang perempuan caleg dan untuk mengetahui bagaimana literasi politik perempuan caleg di Kab, Tanah Datar pada pemilu 2019.

Sepintas tidak ada yang salah dengan demokrasi, karna partai politik telah memenuhi amanat undang-undang afirmasi terkait pemenuhan kuota 30% keterwakilan politik perempuan untuk ikut dalam pemilu. Namun jika dilihat lebih kritis mengapa perempuan mau dijadikan sebagai alat politik dan cenderung tidak menjadi wakil rakyat dan bersaing secara sehat dan prosedural padahal penting bagi perempuan untuk membawa visi-misi dalam sistem perwakilan.

Dengan adanya regulasi pemerintah tersebut dengan mewajibkan keterwakilan calon anggota legislatif serta masih banyaknya perempuan yang menjadi alat politik karena masalah identitas, wawasan yang kurang mumpuni dalam bidang politik, dan adanya masalah sosial, ekonomi ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “Literasi Politik Perempuan Caleg DPRD Di Kabupaten Tanah Datar Pada Pemilu 2019”

Maka kebaruan atau perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti melakukan analisis terkait bagaimana literasi politik para perempuan caleg dilihat dari 3 komponen yaitu kognitif, afektif dan juga konatif, dengan mewawancarai perempuan caleg legislatif di Kabupaten Tanah Datar.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu daerah yang ada di Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar sendiri terdapat 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Dengan jumlah penduduk sebanyak 374.431 jiwa. Di Kabupaten Tanah Datar juga tidak terlepas dari budaya patriarki, dimana budaya ini sudah melekat dan mengakar di daerah Minangkabau yang mana kepercayaan terhadap laki-laki dipandang lebih mampu menjadi pengambil keputusan maupun untuk menjadi pemimpin dan dapat mewakili keputusan dari kaum perempuan.

Kondisi politik yang ada di Kabupaten Tanah Datar tercermin dalam pemilu legislatif 2019 di Kabupaten Tanah Datar itu diikuti oleh 149 perempuan caleg dengan 14 partai pengusung, hanya 3 orang perempuan caleg yang berhasil menduduki kursi anggota legislatif, keadaan ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah perempuan caleg yang mencalonkan diri.

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap latar belakang pendidikan para perempuan caleg secara umum terlihat dari tabel berikut:

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Perempuan caleg Kabupaten Tanah Datar pada Pemilu 2019

| Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|--------------------|--------|
| S3 | - |
| S2 | 2 |
| S1 | 63 |
| D3 | 16 |
| SMA | 68 |
| SMP | - |
| SD | - |

Sumber: Data DCS DPRD Kab. Tanah Datar pemilu 2019

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perempuan caleg dengan latar pendidikan SMA itu lebih mendominasi dari keseluruhan daftar caleg perempuan.

Secara asumsi berdasarkan teori literasi politik bahwa seseorang yang memiliki pemahaman yang kurang baik tentang politik ini belum memenuhi standar untuk bisa menjadi anggota legislatif diduga bahwa mereka belum cukup mapan dan memiliki literasi politik yang kurang baik sehingga politisi perempuan yang memiliki wawasan dan pemahaman yang luas tentang politik lebih diutamakan.

Asumsi peneliti dengan pendidikan yang rendah yang hanya SMA maka perempuan caleg yang dicalonkan itu memiliki literasi yang kurang baik tentang politik dan kurang paham dengan isu-isu politik yang terjadi di masyarakat. Dilihat dari tingkat pendidikan yang umumnya SMA ini membuat para perempuan caleg mau-mau saja dicalonkan oleh partai politik untuk ikut sebagai kandidat partai dan ini sekaligus untuk menaikkan popularitas mereka di daerah masing-masing.

Sehingga muncul asumsi peneliti ingin membuktikan bahwa perempuan yang ikut pemilu ini adalah dorongan dari partai politik bukan dari diri sendiri dan perempuan caleg ini memiliki literasi politik yang kurang baik sehingga mereka hanya menjadi orang-orang yang sekedar memenuhi kuota dan dijadikan alat politik oleh partai politik.

Asumsi penelitian ini berangkat dari pernyataan salah satu informan (seorang caleg) yang berasal dari partai G inisial E menyatakan bahwa keikutsertaannya dalam pemilu 2019 ini dikarenakan adanya dorongan dari partai

politik agar memenuhi kuota supaya partai lolos mengikuti pemilu untuk mencalonkan diri dalam pemilu, dia menyatakan bahwa dia tidak paham akan politik dan isu-isu politik yang terjadi di masyarakat dan juga dirinya masih kurang berpengalaman dalam dunia politik.

Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa literasi politik perempuan terhadap pemilu maupun sistem politik masih kurang. Dengan adanya dorongan dari partai politik ini mencerminkan bahwa dorongan untuk masuk pemilu itu bukan dari diri sendiri melainkan dari partai politik, dengan sedikitnya dorongan dari diri sendiri itu maka peneliti berasumsi bahwa para perempuan caleg yang ikut dalam pemilu itu belum memiliki literasi yang cukup untuk bisa bergabung dalam dunia politik sehingga mereka hanya sekedar orang-orang yang memenuhi kuota saja dan dijadikan alat oleh partai politik.

Fenomena tersebut memperkuat dugaan bahwa literasi politik perempuan masih rendah dalam pengetahuan, pengalamannya tentang organisasi dan sistem politiknya. Idealnya yang diharapkan perempuan sebagai mayoritas penduduk Indonesia, perempuan yang maju dan bergabung di parlemen harus tahu, mau dan mampu untuk menjadi wakil rakyat. Hal ini didukung dengan wawasan dan pengetahuan yang cukup tentang politik dan mengerti sistem politik.

Mengapa jika perempuan caleg tersebut sadar tidak memiliki pemahaman terkait sistem politik dan sumber-sumber kekuasaan yang cukup bersedia menjadi calon legislatif, maka jawabannya adalah karena kurangnya literasi politik dari perempuan tersebut.

Literasi politik menggambarkan kondisi pemahaman dan keterlibatan, perempuan yang direkrut tidak mengerti pengkaderan, calon legislatif perempuan hanya membawa sebatas keyakinan bahwa ia mampu karena memiliki status sosial tanpa memikirkan basis sosial, pengetahuan dan ekonomi. Bahkan caleg juga tidak paham *zypper system* atau penomoran peserta pemilu. Sehingga perempuan sering mendapatkan nomor yang kurang strategis, perempuan yang mendapat nomor urut 1, 2, dan 3 adalah perempuan-perempuan yang menurut partai telah tergambar kemenangannya (Mulia dkk, 2005: 121).

Perempuan harus memiliki kapasitas, kualitas dan juga membawa visi-misi yang mampu membuat perempuan di Indonesia merasa terwakili dengan keberadaannya di parlemen. Secara regional permasalahan keterwakilan politik kurang mendapat penguatan karena terbelenggunya pengetahuan dan kemampuan politik akibat kultural maupun struktural juga dirasakan oleh Kabupaten Tanah Datar yang tercermin dalam pemilu legislatif pada tahun 2019.

Berikut daftar tabel calon anggota legislatif perempuan yang terpilih:

Tabel 1.4
Anggota legislatif perempuan terpilih pada Pemilu legislatif di Kabupaten Tanah Datar periode 2019-2024

| Nama Terpilih | Calon Partai yang mengusung | Daerah Pemilihan (Dapil) | Jumlah suara |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|--------------|
| Donna | Demokrat | Dapil II | 1.599 Suara |
| Kamrita | Gerindra | Dapil II | 1.004 Suara |
| Wandra Wati | Hanura | Dapil I | 988 Suara |

Sumber: KPU Kab Tanah Datar

Terdapat 3 calon legislatif perempuan yang berhasil menduduki kursi parlemen di Kabupaten Tanah Datar pada pemilu legislatif 2019 yaitu Donna,

Kamrita dan Wandra Wati hal ini hanya menyumbangkan 8.57% keterwakilan politik perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Datar. Ketiga calon legislatif perempuan tersebut adalah perempuan-perempuan yang sudah terbiasa bergabung di dunia politik dengan latar belakang pendidikan S1.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana literasi politik perempuan caleg di Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019?



1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu, untuk mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana literasi politik perempuan caleg DPRD di Kabupaten Tanah Datar pada pemilu 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran mengenai literasi politik, kemudian penelitian ini juga diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan serta khasanah karya-karya dalam bidang literasi politik di Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembaca guna menambah ilmu pengetahuan mengenai literasi politik dan strategi bagi caleg perempuan untuk meningkatkan literasi politiknya dalam dunia politik.

